

Discursive Strategy of the Relationship Between Islam and Democracy on Room for Debate Rubric of *nytimes.com*

Alfi Syahriyani*
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, Indonesia
alfi.syahriyani@uinjkt.ac.id

Untung Yowono
Universitas Indonesia
Depok, Indonesia
untung.yuwono@ui.ac.id

Afdol Tharik Wastono
Universitas Indonesia
Depok, Indonesia
afdol.tharik@ui.ac.id

Abstract

Different perspectives on the compatibility between Islam and Democracy are still problematic and have been widely discussed on the international media, especially after the Arab Spring. This study aimed to reveal the changes in social beliefs about the relationship between Islam and democracy within the discourse on Room for Debate rubric, nytimes.com. The data were the written text (verbal) comprising the introductory segment from the editor, the opinion segment comprising 6 articles, and the public comment segment. The method used in this study was the qualitative method. This study employed Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA) (2013) to reveal the discursive strategy of the writers in negotiating the democratic and Islamic values, to investigate the production, distribution, and consumption of the text, and to identify the social context which causes the discourse of the relationship between Islam and Democracy to appear. The finding showed that there were some democratic values negotiated within the discourse that showed changes in social beliefs about the relationship between Islam and democracy in the modern view. The value negotiation showed the alignment of the writers towards the progressive Muslim actors who supported the modern democratic government system.

Keywords: *critical discourse analysis; democracy; discursive strategy; Islam; modernism*

*Corresponding Author

Abstrak

Perbedaan perspektif mengenai kesesuaian hubungan Islam dengan demokrasi masih menjadi sesuatu yang problematis dan banyak diperbincangkan dalam media internasional, terutama sejak terjadinya peristiwa the Arab Spring. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan perubahan keyakinan sosial mengenai kesesuaian hubungan Islam dengan demokrasi dalam wacana pada rubrik Room for Debate situs nytimes.com. Data yang dianalisis berupa teks tulis (verbal), yang terdiri dari segmen pengantar dari redaksi, segmen opini yang terdiri atas 6 artikel, dan segmen komentar publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang didasarkan pada teori Analisis Wacana Kritis (AWK) Fairclough (2013). Pendekatan AWK digunakan untuk mengungkapkan strategi pewacanaan para penulis teks dalam menegosiasikan nilai-nilai demokratis dengan Islam, menginvestigasi proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks, juga mengidentifikasi konteks sosial yang menyebabkan wacana Islam dan demokrasi dalam rubrik Room for Debates nytimes.com muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat negosiasi nilai-nilai demokratis yang merefleksikan perubahan keyakinan sosial mengenai hubungan Islam dengan demokrasi dalam pandangan modern. Negosiasi nilai tersebut mengindikasikan keberpihakan penulis terhadap kalangan muslim progresif yang mendukung sistem pemerintahan demokrasi modern.

Kata kunci: analisis wacana kritis; demokrasi; Islam; modernisme; strategi pewacanaan

المخلص

و تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن التغيرات في المعتقدات الاجتماعية فيما يتعلق بتوافق العلاقة بين الإسلام والديمقراطية في الخطاب في غرفة النقاش على موقع **nytimes.com**. و تكون البيانات التي تم تحليلها في شكل نص مكتوب (شفهي) الذي يتكون من مقطع تمهيدي من المحرر، ومقطع رأي يتكون من 6 مقالات، وقسم التعليق العام. أما الطريقة المستخدمة في هذا البحث فهي طريقة نوعية تعتمد على نظرية تحليل الخطاب النقدي لفيرلوجه في عام 2013. و يُستخدم منهج تحليل الخطاب النقدي للكشف عن استراتيجيات الخطاب لكتاب النصوص في التفاوض على القيم الديمقراطية مع الإسلام، والتحقق في عمليات إنتاج النصوص وتوزيعها واستهلاكها، فضلاً عن تحديد السياق الاجتماعي الذي يتسبب في ظهور خطاب الإسلام والديمقراطية في غرفة المناقشات في **nytimes.com**. و تظهر النتائج أن هناك مفاوضات حول القيم الديمقراطية التي تعكس التغيرات في المعتقدات الاجتماعية فيما يتعلق بالعلاقة بين الإسلام والديمقراطية من نظرية حديثة. و تشير قيمة التفاوض إلى اصطافاف الكاتب مع المسلمين التقدميين الذين يدعمون نظام الحكم الديمقراطي الحديث.

الكلمات الرئيسية: الإسلام؛ العلاقة؛ ديمقراطية؛ غرفة للمناقشات **nytimes.com**

PENDAHULUAN

Sejarah Islam mencatat bahwa abad ke-18 merupakan “masa kegelapan” bagi umat Muslim. Kekuasaan sultan di bawah kepemimpinan Turki Ustmani terpecah belah dan mengalami kemunduran (Voll, 2019). Ketika memasuki abad ke-19, koloni Barat melakukan ekspansi dan membuat dunia Islam mengalami benturan dengan nilai-nilai modern. Setelah menyadari betapa mundurnya umat Islam bila dihadapkan dengan kemajuan Barat, para pemimpin Muslim mulai memikirkan cara untuk melakukan pembaruan (*tajdid*), atau yang dikenal juga dengan “proses modernisasi” (Nasution, 2014).

Dalam bidang politik, banyak ahli yang memperdebatkan apakah Islam sesuai dengan konsep politik modern atau konsep negara bangsa (*nation-state*). Beberapa pihak menilai Islam sebagai suatu “masyarakat sipil,” sebagian lagi menilai sebagai suatu sistem “peradaban yang menyeluruh,” ada juga yang melihatnya sebagai agama dan negara. Perbedaan perspektif ini memunculkan berbagai bentuk sistem negara dalam dunia Islam, dan masih menjadi sesuatu yang problematis hingga saat ini (Darajat, 2019; Effendy, 2001)

Terkait dengan konsep agama dan negara, demokrasi menjadi salah satu tema menarik yang sering diperbincangkan dalam berbagai media. Banyak ahli telah berupaya untuk merespons kesesuaian Islam dengan demokrasi dari beragam sudut pandang. Samuel Huntington menyatakan bahwa negara dengan mayoritas Muslim resisten dengan sistem politik demokrasi karena dalam pandangannya, agama Islam menolak nilai-nilai kebebasan dan pluralisme (Hefner, 2010). Berbeda dengan Huntington, observasi Esposito dan Voll menunjukkan bahwa dunia Muslim di abad 21 justru menunjukkan dukungan yang positif terhadap sistem pemerintahan demokratis (Esposito et al., 2016). Beberapa intelektual Muslim bahkan memandang bahwa Islam memiliki kesesuaian dengan demokrasi karena adanya koherensi nilai yang terkandung di dalamnya, seperti prinsip persamaan (*al-musawah*), termasuk di antaranya nilai HAM, keadilan, dan kesetaraan; prinsip kebebasan (*al-huriyah*), pertanggungjawaban publik (*al-mas’uliyah*), dan kedaulatan rakyat atau musyawarah (*syura*) (Ar-Rahal, 2000).

Praktik demokrasi di beberapa negara Islam saat ini menunjukkan pertumbuhan yang berarti, walaupun dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan gejolak. Salah satunya terjadi di kawasan Timur Tengah. Pada akhir tahun 2010, kebangkitan demokrasi di kawasan Timur Tengah ditandai dengan maraknya aksi demonstrasi. Aksi tersebut dipicu oleh situasi pemerintahan yang *status quo* dan dianggap otoriter oleh masyarakat. Kondisi yang terjadi di kawasan Timur Tengah tersebut berlangsung sejak tahun 2010, dimulai dari Tunisia, kemudian menjalar ke Aljazair, Yordania, Mesir, Libya, Bahrain, Suriah, Yaman, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Aksi tersebut diakui beberapa analis sebagai gelombang keempat demokrasi dan dikenal dalam media Barat sebagai “*The Arab Spring*” (Esposito et al., 2016).

Argumentasi tentang hubungan Islam dengan demokrasi tidak hanya muncul di kalangan Muslim, tetapi juga di kalangan Barat. Argumentasi tersebut selanjutnya menjadi wacana dalam media dan ditanggapi secara berbeda-beda. Munculnya pandangan dalam media tersebut tentu tidak terlepas dari sejarah perubahan sosial-politik yang telah menciptakan ketegangan antara dunia Muslim dan dunia non-Muslim, seperti Peristiwa Revolusi Dunia Arab (*the Arab Spring*), Peristiwa 9/11, serta perang di Afghanistan, Irak, Palestina dan negara-negara Timur Tengah lainnya (Alatas & The Centre for Research on Islamic and Malay Affairs (RIMA), 2005).

Menanggapi peristiwa *the Arab Spring* dan persoalan mengenai demokrasi, rubrik *Room for Debat*, *nytimes.com* mempublikasikan beberapa pandangan ahli tentang konsep Islam

dan demokrasi yang dilatarbelakangi oleh tulisan Tariq Ramadhan berjudul “*Waiting for the Arab Spring Ideas*”. Rubrik *Room for Debate* dalam *nytimes.com* menarik untuk dikaji karena *nytimes.com* adalah media daring (*online*) di bawah *The Times* yang merupakan instansi penting dalam sejarah demokrasi Amerika. *The New York Times* adalah media yang paling banyak menerima *Pulitzer Prizes*, yaitu penghargaan paling bergengsi dalam jurnalisme Amerika Serikat (Usher, 2014). Selain itu, *nytimes.com* memegang nilai jurnalisme daring, yaitu *interactivity* (interaktivitas), yang sangat mungkin memunculkan keterlibatan warganet (*netizens*) dalam proses konsumsi teksnya, sehingga dapat terlihat bagaimana teks diterima oleh pembaca. Dalam hal ini, para penulis opini memiliki strategi pewacanaan tersendiri dalam membangun opini publik. Namun, ada indikasi bahwa pendapat-pendapat tersebut mengarah pada satu pemahaman mengenai kesesuaian hubungan Islam dengan demokrasi, atau dengan kata lain, ada indikasi upaya para penulis untuk mengkonstruksi opini publik.

Studi tentang Islam dalam media Barat dengan pendekatan analisis wacana kritis sebetulnya telah banyak dilakukan, tetapi hanya fokus pada bagaimana Islam dan Muslim direpresentasikan. Penelitian-penelitian yang ada cenderung berkesimpulan bahwa Muslim dicitrakan secara negatif yang diasosiasikan dengan kekerasan, konflik, dan radikalisme (Törnberg & Törnberg, 2016; Topkev, 2016; Samaie & Malmir, 2017). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini melihat bagaimana para penulis opini dalam rubrik *Room for Debate* menegosiasikan kesesuaian nilai-nilai demokrasi modern dengan nilai-nilai Islam. Pandangan yang dikemukakan dalam rubrik tersebut diasumsikan mengarah pada konstruksi identitas, representasi individu dan kelompok, serta refleksi perubahan sosial yang terjadi antara dunia Barat dan Islam. Wacana yang disusun oleh penulis dan redaksi *Room for Debate* juga mengindikasikan adanya gambaran orientasi *nytimes.com* dalam mengangkat isu mengenai nilai-nilai modern, seperti demokrasi, HAM, persamaan, kebebasan, pluralisme, kesetaraan gender, dan sebagainya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (AWK) Fairclough karena lebih berfokus pada pembentukan wacana akibat adanya perubahan sosial (*social change*) (Fairclough, 2013; Flowerdew & Richardson, 2017). Representasi dalam pandangan Fairclough (2003) sejalan dengan apa yang disebut Halliday sebagai fungsi ideasional (*ideational function*). Sedangkan, relasi sosial (*social relation*) berhubungan dengan bagaimana para aktor wacana saling terhubung satu sama lain, yang dapat dilihat dari fungsi tekstual (*textual function*). Terakhir, identitas atau identifikasi (*identification*) yang berkaitan dengan bagaimana partisipan wacana mengidentifikasikan dirinya. Identitas merupakan unsur yang bertalian dengan fungsi interpersonal (*interpersonal function*) (Fairclough, 2003; Flowerdew, 2012; Halliday, 2014)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan AWK, yaitu suatu pendekatan secara eksplanatoris yang dikembangkan oleh Fairclough (Fairclough, 2013). Metode kualitatif pada dasarnya memberikan pemahaman mendalam atas fenomena sosial yang terjadi. Beberapa karakteristik penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu fleksibel, lunak, subjektif, politis, berdasarkan studi kasus, spekulatif, dan mengakar (Silverman, 2004).

Sumber data dalam penelitian ini adalah situs *nytimes.com*. Data yang dianalisis adalah rubrik *Room for Debate* edisi 4 Oktober 2012 yang merupakan bagian dari rubrik opini dalam situs *nytimes.com*. Dalam rubrik ini, peneliti menganalisis segmen pengantar dari redaksi, segmen opini yang merupakan respons atas pernyataan dari redaksi, serta komentar publik terkait segmen pengantar dari redaksi dan segmen opini. Khusus dalam segmen opini,

terdapat enam judul artikel yang dianalisis, yaitu “*Islam Can Lead in Either Direction,*” “*A Hurdle That Can Be Overcome,*” “*The Prophet’s Plurality,*” “*Rejected by Religions, but Not by Believers,*” “*Muslims Have Pushed for Democracy,*” dan “*What Islam Says, and Doesn’t Say.*”

Adapun tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan dan pengolahan data adalah, pertama, tahap identifikasi, yaitu dengan melakukan penelusuran terlebih dahulu pada situs *nytimes.com*, kemudian memilih rubrik *Room for Debate* yang terdiri dari beberapa opini. Kedua, tahap klasifikasi. Data yang dianalisis hanya berupa teks tulis (verbal), yang terdiri dari segmen pengantar dari redaksi, segmen opini yang terdiri dari enam artikel, dan segmen komentar publik. Dalam rubrik tersebut, terdapat beberapa topik yang dipublikasikan dalam waktu yang berbeda-beda. Penulis memilih topik “*Is Islam an Obstacle to Democracy?*” yang dipublikasikan pada 4 Oktober 2012. Ketiga, tahap justifikasi, yaitu menentukan bagian-bagian dalam rubrik *Room for Debate* yang dapat dijadikan data. Dalam tahap ini, data yang dipilih hanya berupa teks tulis (verbal). Keempat, tahap kodifikasi, yaitu dengan memberi nama atau nomor untuk tiap segmen atau korpus data. Kode B.3.2 berarti Teks B, paragraf ke-3, kalimat ke-2. Tahap terakhir adalah tahap reduksi, yaitu menyeleksi komentar-komentar publik. Komentar publik yang diolah hanya yang mengacu pada teks, sedangkan komentar yang tidak mengacu pada teks akan diabaikan.

Adapun teknik analisis data yang dilakukan adalah tahap deskripsi, tahap interpretasi, dan tahap eksplanasi. Tahap deskripsi memfokuskan penelitian pada bahasa. AWK dalam hal ini mengadopsi teori gramatika fungsional (*functional grammar*) Halliday (2014). Khusus untuk pilihan diksi dan frasa digunakan pendekatan analisis komponen makna dari Nida (2015), serta elemen argumen disusun menggunakan analisis argumen dari Toulmin (2003). Setelah tahap deskripsi, dilanjutkan dengan tahap interpretasi, yaitu melihat bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi. Konsumsi teks dianalisis dengan mengamati komentar publik yang mengacu pada teks. Terakhir, tahap eksplanasi, yaitu dengan menganalisis praktik sosial-budaya yang tercermin dalam teks, dan terakhir adalah kesimpulan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dari proses analisis yang telah dilakukan, tampak bahwa tujuan dimuatnya rubrik *Room for Debate* adalah mengangkat isu terkini dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada publik untuk memberikan pendapatnya secara kritis. Rubrik *Room for Debate* terdiri atas tiga segmen, yaitu segmen pengantar, segmen opini, dan segmen komentar publik. Segmen pengantar merupakan pernyataan dari redaksi yang berfungsi untuk membuka perdebatan dan memberikan umpan, baik bagi penulis opini, maupun publik atau pembaca. Segmen opini berfungsi untuk mengelaborasi atau menjawab permasalahan yang diangkat redaksi secara lebih mengakar.

Hasil analisis menunjukkan bahwa para kontributor terpilih sama sekali tidak menanggapi satu sama lain. Pada kenyataannya, kontributor yang disebut sebagai *debater* memiliki pandangan yang beririsan, yaitu kesepakatan mengenai kesesuaian hubungan Islam dengan demokrasi. Sebaliknya, pada tataran praktik wacana, publik memberikan respon, baik terhadap umpan dari redaksi, maupun opini para kontributor secara pro dan kontra. Dari penelitian yang dilakukan, terdapat sejumlah temuan sebagai berikut.

Analisis Representasi dalam Klausa

Pilihan Diksi dan Frasa

Ditinjau dari komponen maknanya, pilihan diksi dan frasa yang ada dalam segmen pengantar, yaitu kalimat pembuka dari redaksi, cenderung memiliki daya yang dapat

memancing publik untuk kritis dan merespon umpan dari redaksi secara pro dan kontra. Sementara itu, dalam teks opini, yaitu teks yang menanggapi segmen pengantar dari redaksi, pilihan diksi atau frasa yang digunakan cenderung lugas, kritis, apresiatif, dan memihak.

Dalam **segmen pengantar** misalnya, pandangan penulis mengenai realitas dapat terlihat dari pemilihan judul. Judul yang dimuat oleh penulis—dalam hal ini adalah redaksi—adalah **“Is Islam an Obstacle to Democracy?”**. Ditinjau dari aspek tekstual, struktur tematik dalam judul ini disusun atas *Is* dan *Islam* sebagai tema, yaitu unsur yang menjadi titik tolak ujaran, atau unsur yang mengarahkan klausa sesuai dengan konteksnya. Sementara itu, *an obstacle to democracy* merupakan rema yang merupakan unsur yang menyusul atau yang berkaitan dengan tema. Secara *interpersonal*, klausa tersebut terdiri atas *finite verbal operator* yaitu *is* yang diletakkan di posisi pertama sebelum *Islam* yang berperan sebagai subjek. Dengan demikian, modus gramatikal (*grammatical mood*) kalimat tersebut adalah kalimat interogatif. Fungsi tuturan (*speech function*) kalimat interogatif adalah mengharapkan jawaban positif (*yes, it is*) atau negatif (*no, it is not*) (Fairclough, 2003; Halliday, 2014)

Kemudian, secara *experiential* atau *ideational*, kalimat ini memiliki hubungan signifikasi, atau memunculkan adanya proses pemaknaan (*representasi*). Dengan kata lain, maksud tuturan penulis adalah mempertanyakan apakah Islam direpresentasikan atau diidentifikasi sebagai penghalang bagi demokrasi. Tabel 1. menguraikan klausa dengan tiga lini makna metafungsional menurut Halliday, yaitu *textual*, *interpersonal*, dan *ideational*.

Tabel 1. Pemerian Judul Teks A (Segmen Pengantar)

Metafunctional Meaning	<i>Is</i>	<i>Islam</i>	<i>an Obstacle to Democracy?</i>
Textual	Theme (1)	Theme (2)	Rheme
Interpersonal	Finite Mood	Subject	Residue
Ideational	Process: Verb	Identified/Token	Identifier/Value

Selanjutnya, komponen makna diperikan bergantung pada tujuan penelitian. Ditinjau dari pilihan diksi, pada judul **“Is Islam an Obstacle to Democracy?”**, penulis teks memilih kata *obstacle* dalam topik perdebatan untuk membuka permasalahan. Alasan penulis teks memilih kata *obstacle* dapat dijelaskan dengan melihat komponen makna *obstacle* yang mengacu pada cara penyajian komponen makna (Nida, 2015).

Komponen makna **obstacle**:

[DIFFICULTY], [OBSTRUCTION], [BARRIER], [BLOCK], [HINDRANCE], [IMPEDIMENT], [IMPOSSIBILITY TO ACHIEVE SOMETHING]

Kata *obstacle* memiliki komponen makna sebagai satu penghalang yang membuat sesuatu sulit tercapai, sehingga membutuhkan teknik-teknik tertentu serta memakan waktu yang lama untuk dapat diatasi. Dari analisis komponen makna dan struktur kalimat yang dimuat, dapat disimpulkan bahwa judul dalam segmen pengantar mengindikasikan pandangan penulis teks yang menyiratkan bahwa ada hubungan yang tidak harmonis antara Islam dengan demokrasi. Hubungan yang tidak harmonis ini diwakili dengan kata *obstacle* yang dimuat dalam judul, dan struktur kalimat interogatif yang memunculkan representasi terhadap Islam. Dengan kata lain, Islam diandaikan sebagai penghalang yang membuat demokrasi sulit tercapai.

Lebih lanjut, pilihan diksi dan frasa yang dimuat juga merefleksikan adanya perubahan sosial di dunia Muslim dan dialektika antara hubungan Islam dengan Barat. Tabel 1 menunjukkan bagaimana pilihan diksi dan frasa yang digunakan oleh penulis cenderung menunjukkan keberpihakan terhadap individu atau kelompok. Strategi pilihan diksi oleh

penulis teks dapat dilihat dari kalimat pertama dalam segmen pengantar, yang berfungsi untuk membuka wacana atau mengajukan pertanyaan sebelum enam penulis menanggapi melalui opini masing-masing. Kata *scholar* yang terdapat dalam pernyataan berikut ini mengindikasikan maksud penulis:

As Arab populations “pursue values like freedom, justice, equality, autonomy and pluralism, and new models of democracy and of international relations,” the scholar Tariq Ramadan wrote in The New York Times this week, “they need to draw on Islamic traditions.” (A.1.1)

Kata *scholar* pada klausa di atas memiliki komponen makna [HUMAN], [ADULT], [INTELLECTUAL], [ACADEMICIAN], [STUDENT], [A LEARNED PERSON], [A KNOWLEDGABLE PERSON]. Dengan demikian, penulis teks memuat kata *scholar* yang menunjukkan bahwa pihak yang dikutip oleh penulis berasal dari kalangan intelektual yang memiliki pengetahuan. Dimuatnya kata tersebut mengindikasikan bahwa penulis teks hendak mengemukakan tesisnya secara terbuka dengan dimediasi oleh seorang ahli.

Selanjutnya, dari pilihan diksi yang dimuat dalam segmen opini, ada indikasi bahwa para penulis memberikan dukungan terhadap demokrasi dan sekulerisme. Hal ini dapat dilihat dari cara penulis mengidentifikasi beberapa partisipan wacana, seperti *Rachid al-Ghannouchi*, dan *Recep Tayyip Erdogan* secara apresiatif.

Fast forward to our times: Leading Islamist reformers like Rachid al-Ghannouchi in Tunisia draw on those teachings to argue that democracy best serves these principles. (B.3.8)

In Turkey, the prime minister, Recep Tayyip Erdogan, has gone one step further and lectured the Muslim Brotherhood of Egypt on the importance of secularism in maintaining democracy and guaranteeing religious freedom for all (B.3.9)

Just as these relatively progressive voices draw on Islam to shape their societies in the direction of democracy, religious conservatives argue that Islam forbids democracy. (B.4.10)

Only this week in Tunisia I was told by young Salafists that democracy means rule of the people, and that Islam believes in government for God alone. (B.4.11)

Dalam klausa-klausa di atas, penulis memberikan apresiasi terhadap mereka yang mendasari tindakannya sesuai dengan tindakan Muhammad dan perintah Al Qur'an, dan mengkontekstualisasikannya dengan tokoh-tokoh muslim masa kini, seperti *Recep Tayyip Erdogan* dan *Rachid al-Ghannouchi*. Oleh karena itu, mereka disebut oleh penulis sebagai suara progresif (*progressive voices*), yaitu orang atau sekelompok orang yang berupaya untuk mereformasi gagasan atau kondisi tertentu dengan ide-ide baru demi kehidupan yang lebih maju.

Kata *progressive* memiliki komponen makna [HUMAN], [ADULT], [FAVOR A POLITICAL PHILOSOPHY], [REFORMER], [STRIVE FOR BETTER CONDITION], [MODERN], [TOLERANT], [PROMOTE NEW IDEAS], [LIBERAL]

Berbeda ketika penulis menceritakan pertemuannya dengan *young Salafists*. Penulis tidak menamakan (*naming*) partisipan wacana tersebut secara apresiatif seperti halnya *Leading Islamist Reformer* atau *the Prime Minister*. Sebaliknya, penamaan *young salafists* mengindikasikan adanya penghilangan informasi sehingga menimbulkan pertanyaan siapa sebenarnya *young salafists* tersebut? Mengapa penulis menggunakan kata-kata *young* yang merepresentasikan satu kelompok pemuda? Selain itu, dengan menggunakan kalimat tidak langsung, ada indikasi bahwa penulis memformulasi percakapannya dengan para salafi muda tersebut. *Young salafists* direpresentasikan oleh penulis sebagai para pemuda yang menolak kedaulatan rakyat dan menolak demokrasi karena mendasarkan pendapatnya pada ulama di masa lalu, yaitu Ibn Baz dan Ibn Uthaymeen. Oleh karena itu, penulis menyebutnya sebagai kalangan religius konservatif. Kata ini memiliki makna yang berlawanan dengan kata *progressive*, yaitu orang atau sekelompok orang yang menolak perubahan dan ide-ide baru.

Kata *conservative* memiliki komponen makna [HUMAN], [ADULT], [TRADITIONAL VIEWS], [RELUCTANT TO ACCEPT CHANGES], [SCEPTICAL], [OLD VIEW]

Pada bagian ini, penulis tampak menggunakan strategi pewacanaan dengan memuat dikotomi antara dua kutub (*different*). Dari cara penulis menamakan (*naming*) seseorang atau kelompok, dapat dilihat keberpihakan penulis terhadap salah satu pihak. Dengan melakukan strategi penamaan (*naming*), umumnya penulis cenderung berpihak terhadap kalangan Muslim yang dianggap menerima ide-ide baru sebagai akibat dari adanya modernisasi. Beberapa penulis secara eksplisit menyebutkan *Muslim progressives*, *Muslim modernists*, *Muslim thinkers*, *scholar*, *progressives*, dan *reformer* yang menyepakati praktik pelaksanaan sistem demokrasi di negara Muslim. Dalam merepresentasikan Islam, umumnya penulis cenderung memandang Islam sebagai agama yang diinterpretasikan beragam oleh para penganutnya, terutama dalam kaitannya dengan isu pemerintahan demokrasi. Menurut mereka, penafsiran mengenai sesuai atau tidaknya pemerintahan demokrasi dalam Islam, dan nilai-nilai demokrasi modern yang terkandung di dalamnya, tidak terlepas dari aktor atau agen dalam internal Islam sendiri. Namun pada akhirnya, pembaca secara implisit diarahkan untuk menyepakati ide yang berasal dari kalangan progresif, yang dianggap memiliki gagasan baik dan sesuai dengan zaman modern. Tabel 2 menunjukkan pilihan diksi dan frasa yang mengindikasikan adanya representasi terhadap individu dan kelompok.

Tabel 2. Pilihan Diksi dan Frasa yang Mengindikasikan Representasi terhadap Individu atau Kelompok

No.	Diksi dan Frasa
1	<i>Scholar</i>
2	<i>Prophet</i>
3	<i>Progressive</i>
4	<i>Conservative</i>
5	<i>Leading Islamist Reformer</i>
6	<i>Young salafists</i>
7	<i>Muslim modernists</i>
8	<i>Muslim thinkers</i>

Akan tetapi, terlepas dari apresiasi mereka terhadap ide dari kalangan Muslim modern, umumnya penulis juga memberikan kritik atau evaluasi terhadap pelaksanaan demokrasi yang tengah berlangsung di negara Muslim. Pilihan diksi dan frasa yang dimuat oleh penulis mengindikasikan upaya mereka dalam mengevaluasi, mengapresiasi, hingga mengkritik tindakan yang tidak sesuai dengan pandangan mereka. Pada beberapa bagian, misalnya,

sebagian penulis mengapresiasi pelaksanaan demokrasi di negara-negara Islam, seperti Turki, Tunisia, Indonesia, Bangladesh, atau India dengan menyatakan bahwa negara tersebut berhasil menjalankan demokrasi dan dapat dijadikan *role model*. Akan tetapi, pada negara-negara Timur Tengah, seperti Iran, Yordania, Maroko, dan Pakistan, beberapa penulis cenderung memberikan kritikan yang tajam sehingga menyebut negara tersebut sebagai negara dengan pemimpin yang diktator atau gagal dalam menerapkan demokrasi, sehingga disebut *failed model*.

Kemudian, dalam meyakinkan pendapatnya, beberapa penulis menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi dalam mengemukakan argumentasinya, sehingga mengindikasikan adanya klaim kebenaran universal atau adanya upaya legitimasi. Pendapat para penulis dianggap sebagai satu kebenaran umum, sehingga ada indikasi upaya untuk mempengaruhi pembaca dan membangun kesamaan paham, contohnya yaitu frasa *the truth*, *unavoidable truth*, dan *in fact*.

The truth is no religion either encourages or discourages democracy (D.3.3)

Here is the simple, unavoidable truth: there is no such thing as Christianity, Judaism, Islam (D.5.12)

Penggunaan *definite article* 'the' pada frasa *the truth* menunjukkan hal yang spesifik, hal yang sudah diketahui sebelumnya, dan hal yang hanya ada satu-satunya di dunia (Halliday, 2014). Sementara itu, kata *unavoidable* mempraanggapkan sesuatu yang tidak bisa lagi dibantah. Dengan demikian, frasa *the truth* dan *unavoidable truth* mengindikasikan upaya penulis dalam membangun klaim kebenaran universal. Klausa di bawah ini mengindikasikan upaya penulis untuk menggiring pembaca terhadap kebenaran tersebut karena dari pilihan diksi yang digunakan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kebenaran.

Selanjutnya, pilihan diksi dan frasa dalam teks mencerminkan nilai-nilai modern yang dinegosiasikan dengan nilai-nilai Islam serta kondisi dunia Islam saat ini, misalnya dalam beberapa pernyataan berikut:

The values in play in this one example — an example that is essential to Islamic self-understanding — demonstrate significant overlap with the democratic values of participation, freedom, human rights and pluralism (E.4.10)

No more than does any other religious tradition. 18. But individual Muslim leaders do find in their faith the resources to sustain a commitment to elections and pluralism. (F.8.17)

All of us, Muslim and non-Muslim, are now citizens of pluralistic societies where we live together as neighbours. (G.3.11)

The prophet Muhammad bequeathed to us no fixed system of government, but taught Muslims the importance of justice and equality, and of eliminating corruption and bringing rulers to account (B.3.5)

Negosiasi nilai-nilai tersebut memperlihatkan bahwa para aktor dalam dunia Islam, yang dikategorikan sebagai kalangan modernis, saat ini berupaya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang sedang terjadi, atau dengan kata lain, berusaha menjembatani *gap* antara tradisi dan modernisasi dengan menawarkan pemikiran Islam mengenai perubahan dalam sistem politik. Beberapa prinsip demokrasi dinegosiasikan dengan prinsip-prinsip di dalam Islam, yaitu dengan cara memuat wacana sejarah nabi, sejarah cendekiawan masa lalu,

kiprah para pemimpin Muslim saat ini, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab suci. Strategi tersebut menjadi upaya para penulis dalam meyakinkan publik bahwa dunia Islam terbuka terhadap sistem pemerintahan apapun, termasuk demokrasi, selama sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Adapun nilai-nilai yang dinegosiasikan dalam wacana, yaitu nilai keadilan (*justice*), kesetaraan gender (*gender equality*), kesukarelaan atau tanpa paksaan (*non-compulsion*), kesetaraan individu (*individual equality*), kedaulatan (*sovereignty*), keikutsertaan (*participation*), kebebasan (*freedom*), HAM (*human rights*), pluralisme (*pluralism*), penghargaan terhadap perbedaan (*respect for diversity*), otonomi (*autonomy*), perwakilan (*representation*).

Terakhir, **modalitas** (*modality*) atau kata kerja bantu yang dipilih cenderung berfungsi untuk memprediksi dan memberikan masukan. Walaupun dari analisis terlihat bahwa para penulis cenderung berpihak terhadap kalangan modernis, para penulis secara kritis memberikan saran dan kritik bagi pelaksanaan demokrasi di negara-negara Muslim. Umumnya penulis menggunakan pilihan modalitas dalam tingkatan menengah (*median*), seperti *would*, *will*, dan *can* untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika negara-negara Muslim menerapkan demokrasi, misalnya pada judul teks B dan teks F.1.1.

“Islam Can Lead in Either Direction” (Judul Teks B)

If democracy is to be born in the Muslim world, religious political parties will be the midwives (F.1.1).

Namun, di sisi lain sebagian penulis memberikan kritik untuk redaksi atau memberikan masukan bagi pelaksanaannya dengan menggunakan modalitas dalam tingkatan tinggi (*high*) misalnya pada teks G.6.17.

.....and today, must be — a democracy of Muslims who live side by side in a commitment to a “greater we” alongside our neighbors. (G.6.17)

Gramatika

Pada tingkatan gramatika, struktur kalimat memuat tiga fungsi, yaitu secara tekstual yang meliputi tema dan rema; secara interpersonal yang meliputi pola kalimat dan modus gramatikal (*grammatical mood*), dan secara ideasional yang meliputi proses representasi atau identifikasi (Halliday, 2014). Pada bagian ini, ada perbedaan antara tindakan (*action*) dan peristiwa (*event*). Penulis dapat menampilkan aktor sebagai penyebab (tindakan) atau tanpa aktor sebagai penyebab (peristiwa). Pada tingkatan gramatika, maksud penulis dapat dilihat dari makna metafungsional bahasa. Pada aspek tekstual, klausa yang digunakan penulis terdiri dari tema dan rema, kecuali untuk kalimat pertanyaan yang hanya terdiri dari tema I dan tema II. Tema dalam hal ini berfungsi sebagai titik tolak ujaran, dan rema berfungsi sebagai penjelas tema.

Dilihat dari aspek interpersonal, khususnya modus gramatikal, penulis banyak memuat kalimat deklaratif. Modus gramatikal deklaratif berfungsi untuk memberikan ekspresi pernyataan (Halliday, 2014). Ciri kalimat ini adalah cenderung tegas dan lugas. Misalnya pada beberapa klausa di bawah ini:

Islam is not incompatible with democracy (C.1.1)

Islam is what Muslims make it (B.5.13)

Islam as such does not proscribe any one particular system of government (G.1.3)

Muslim thinkers have long argued that fundamental Islamic texts dealing with consultation and representation support both constitutional government and elections (E.7.1)

Tabel 3 menunjukkan contoh kalimat deklaratif yang diperikan berdasarkan aspek *textual, interpersonal, dan ideational*.

Tabel 3. Pemerian Klausa Teks B.5.13

Metafunctional Meaning	<i>Islam</i>	<i>Is</i>	<i>what Muslims make it</i>
Textual	Theme	Rheme (Nominalization)	
Interpersonal	Subject	Verb (Finite)	Object
	Mood		Residue
Ideational	Identified/Token	Relational Process	Identifier/Value

Pada kalimat dalam Tabel 3, modus gramatikal yang digunakan adalah modus deklaratif karena penulis menempatkan *Islam* sebagai subjek, *is* sebagai predikat, dan *what Muslims make it* sebagai objek. Kedudukan rema dan tema pada kalimat ini adalah setara (tema = rema), sehingga tidak ada posisi yang lebih dipentingkan. *Islam* merupakan tema, sedangkan *is what Muslims make it* merupakan rema yang mengalami proses nominalisasi. Fungsi tuturan kalimat dengan tema dan rema setara (*equal*) adalah mengidentifikasi sesuatu. Dengan demikian, maksud penulis dalam kalimat ini adalah mengidentifikasi atau merepresentasikan Islam sebagai agama yang multitafsir atau tidak bisa terlepas dari interpretasi banyak pihak. Dengan demikian, susunan kalimat yang ada dalam opini ini memberi anggapan (*presupposition*) bahwa Islam tidak bisa terlepas dari perubahan sosial, dan perubahan tersebut dilakukan oleh agen, yaitu orang Islam sendiri.

Selanjutnya, pada tingkatan ideasional, penulis juga cenderung merepresentasikan partisipan atau aktor-aktor wacana, baik secara apresiatif maupun secara kritis. Dengan menggunakan wacana perbedaan (*difference*) yang disertai dengan alasan, dukungan para penulis dalam rubrik *Room for Debate* mengarah kepada agen yang menyepakati adanya kesesuaian nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai demokratis (tokoh yang disebut sebagai *muslim progressive* atau *muslim modernist*). Pada bagian ini juga penulis menggunakan tipe proses material, yaitu proses yang menitikberatkan pada tindakan. Contohnya pada klausa di bawah ini:

Leading Islamist reformers like Rachid al-Ghannouchi in Tunisia draw on those teachings to argue that democracy best serves these principles (B.3.8)

The prophet Muhammad bequeathed to us no fixed system of government, but taught Muslims the importance of justice and equality, and of eliminating corruption and bringing rulers to account (B.3.5)

Tabel 4 menunjukkan pemerian klausa yang cenderung merepresentasikan aktor dan tindakan yang dilakukan.

Tabel 4. Pemerian Klausa Teks B.3.5

<i>The prophet Muhammad</i>	<i>bequeathed</i>	<i>to us no fixed system of government, but taught Muslims the importance of justice and equality, and of eliminating corruption and bringing rulers to account (B.3.5)</i>
Subject	Predicator (past)	Complement
Actor	Process: material	Goal

Klausa pada Tabel 4 menunjukkan bahwa penulis memuat aktor Nabi Muhammad (*the prophet Muhammad*) sebagai utusan Tuhan yang mewariskan (*bequeathed*) sistem pemerintahan demokratis. Hal ini mengindikasikan bahwa penulis hendak melegitimasi

tesisnya. Dengan kata lain, sistem pemerintahan demokratis dalam pandangan penulis sesuai juga dengan ajaran Tuhan.

Terakhir, ditinjau dari penggunaan *tenses*, klausa yang dimuat menunjukkan konstruksi waktu dalam wacana. Dimuatnya sejarah politik Islam menunjukkan adanya wacana perubahan sosial yang berlangsung sejak dulu hingga saat ini dalam dunia Islam, misalnya dalam teks C.3.11 dan teks C.3.12.

*Yet, this situation **has been changing** before our eyes (C.3.11)*

*It **started** when Muslim modernists in Egypt in the 19th century **sought** ways for Islam to rise to the challenge **posed by** the West, and **it has accelerated** because of urbanization and technology (C.3.12)*

Wacana perubahan dalam teks dapat dilihat dari *tenses* yang digunakan oleh penulis (Halliday, 2014). Perubahan *tenses* pada kalimat 11 dan 12 di paragraf ke-3 memberikan gambaran mengenai perubahan sosial di Mesir. Pada kalimat 11, penulis menggunakan *present perfect progressive tense* yang ditandai dengan *has been verb+ing* yang menunjukkan bahwa perubahan tersebut dimulai sejak dulu dan masih berlangsung hingga sekarang. *Tenses* pada kalimat 12 selanjutnya diubah menjadi *simple past tense* yang ditandai dengan *Verb 2 started* untuk memberikan gambaran Mesir di masa lalu, yaitu pada saat demokrasi mulai mendapat tempat, dan *present perfect tense* yang ditandai dengan pola *has + Verb 3*.

Analisis Representasi dalam Kombinasi Klausa

Dalam tingkatan kombinasi klausa, penulis memuat beberapa konjungsi dan pronomina atau kata ganti yang memiliki tujuan tertentu. Dalam meyakinkan pendapatnya, sebagian penulis memuat pronomina *we*, *our*, atau *us* yang bersifat inklusif. Hal ini bertujuan untuk melibatkan pembaca dan membangun kesamaan paham, seperti pada teks B.2.5

*The prophet Muhammad bequeathed to **us** no fixed system of government, but taught Muslims the importance of justice and equality, and of eliminating corruption and bringing rulers to account (B.2.5)*

Konjungsi berupa hubungan pertentangan, yaitu *but*, *however*, dan *rather* dimuat untuk memaparkan wacana perbedaan yang menciptakan polemik di dalam wacana. Pada akhirnya, penulis berakhir pada keberpihakannya terhadap satu kondisi, misalnya pada teks E.4.6 dan E.6.9, yang menyimpulkan bahwa Iran adalah contoh negara Islam yang gagal.

*The question in both the Western and the Muslim world, **however**, is whether a Muslim party, once elected, would inevitably make a mockery of that process by creating a religious dictatorship (E.4.6)*

*Iran is a failed model, **however**. (E.6.9)*

Wacana perbedaan selanjutnya juga dimuat untuk mengajak pembaca dalam membandingkan dan mengkritisi dua keadaan, misalnya dalam teks C.2.6.

***But** there is a difference between **these** Greater Indian Ocean societies and **those** in the desert Middle East (C.2.6).*

Dalam kalimat tersebut penulis memuat demonstrativa (lihat Halliday, 2004: 552—553), yaitu *these* dan *those*. Kata *these* dan *those* termasuk *endophoric reference* yang berfungsi untuk mengacu hal yang sudah disebutkan sebelumnya, sehingga membentuk pemaknaan terhadap dua keadaan. Corak masyarakat Muslim di negara Asia Tenggara-Asia Selatan dan Timur Tengah diidentifikasi berbeda.

Kemudian, hubungan penjelasan berupa konjungsi *that* juga dimuat untuk memperjelas satu hal atau kondisi, sedangkan hubungan sebab akibat (*causal condition*), yaitu berupa *as*, *because*, *if*, dan *so that* dimuat untuk memaparkan alasan yang dapat memperkuat argumennya, misalnya dalam teks bawah ini:

*The question of whether Islam is compatible with democracy is nonsensical at its core, first **because** it ignores basic empirical evidence (the five most populous Muslim countries in the world are all democracies) and second **because** it presumes that Islam is somehow different, unique or special -- that unlike every other religion in the history of the world, Islam alone is unaffected by history, culture or context. (D.1.1)*

*In South and Southeast Asia, Islam was spread gradually over the course of centuries by cosmopolitan merchants, **so that** it was layered atop Sanskrit, Javan and Malayan civilizations (C.2.7)*

***Because** this belief system was complete and admitted no error, it was difficult for a system like democracy – which is all about compromises, half-measures and fallibility – to gain a foothold (C.2.10)*

Dengan menambahkan konjungsi *so that* dan *because* yang menunjukkan hubungan sebab akibat (*causal conditional*) penulis hendak mengatakan bahwa kondisi Islam yang ada saat ini tidak terlepas dari faktor sejarah dan interpretasi masyarakat setempat. Hubungan sebab-akibat tersebut memberikan praanggapan bahwa negara Asia dan Asia Selatan mudah menerima demokrasi karena masyarakatnya menegosiasikan nilai Islam dengan budaya lokal, sedangkan negara Mesir sulit menerimanya karena masyarakatnya telah menjadikan Islam sebagai sistem kepercayaan yang dianggap sempurna dan tanpa cacat. Dimuatnya hubungan sebab-akibat ini mengindikasikan maksud penulis yang ingin mengatakan bahwa demokrasi akan sulit dipraktikkan jika Islam dijadikan sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh.

Analisis Genre

Dilihat dari penggunaan *genre*, argumentasi penulis disusun dengan elemen-elemen argumen yang terdiri atas *claim*, *stated reason*, *ground*, *qualifier*, serta *rebuttal*. Elemen argumen ini menciptakan rantai *genre* yang menggabungkan berbagai macam tindakan, yang pada akhirnya bertujuan memberikan masukan, dan menggiring pembaca agar yakin terhadap pendapatnya, atau dengan kata lain memiliki “*pragmatic purpose of persuasion*” (Resigl, 2014; Toulmin, 2012). Dari analisis yang telah dilakukan, semua teks disusun atas *claim* (C) dan *stated reason* yang terpisah, yang secara implisit mengindikasikan adanya hubungan sebab akibat.

Selanjutnya, penulis berupaya untuk memaparkan *ground* (G) atau bukti yang berfungsi untuk memperkuat *claim* dan menunjukkan posisi keberpihakan penulis. Bukti yang dimuat di antaranya berupa uraian sejarah Islam dan kondisi negara-negara Muslim saat ini. Kalimat-kalimat dalam Tabel 5 menunjukkan upaya penulis yang secara implisit menyusun kalimatnya dengan hubungan sebab akibat dan memperkuat pendapatnya dengan fakta atau bukti-bukti terkait.

Tabel 5. Contoh Elemen Argumen dalam Teks B dan Teks C

Teks	Elemen Argumen
Teks B	<p>Claim <i>Essentially, Islam is what Muslims make it (5.1)</i></p> <p>Stated Reason <i>(because) Religions are replete with multiple narratives and several interpretations of almost every facet of a faith (1.3)</i></p> <p>Ground</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Fast forward to our times: Leading Islamist reformers like Rachid al-Ghannouchi in Tunisia draw on those teachings to argue that democracy best serves these principles. (2.8)</i> <i>In Turkey, the prime minister, Recep Tayyip Erdogan, has gone one step further and lectured the Muslim Brotherhood of Egypt on the importance of secularism in maintaining democracy and guaranteeing religious freedom for all. (2.9)</i>
Teks C	<p>Claim <i>Islam is not incompatible with democracy (1.1)</i></p> <p>Stated Reason <i>(because) Throughout South and Southeast Asia, Islamic and largely Islamic societies have experimented admirably with democracy. (1.2)</i></p> <p>Ground</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>In Indonesia, an overwhelmingly Muslim state, democracy has provided stability and development, proving pessimists wrong. (1.3)</i> <i>Bangladesh and Malaysia, in both of which Islam is the dominant religion, are also in the process of successful democratic transitions. (1.4)</i> <i>India, another successful democracy, has one of the highest populations of Muslims in the world. (1.5)</i> <i>It started when Muslim modernists in Egypt in the 19th century sought ways for Islam to rise to the challenge posed by the West, and it has accelerated because of urbanization and technology. (2.3)</i> <i>Early phases of the democratic experiment will be tumultuous, with Islamic parties playing a major role. (2.4)</i>

Dari analisis yang telah dilakukan, hanya 2 teks yang memuat *warrant* (W) dan *backing* (B) secara eksplisit. *Warrant* yang eksplisit berupa pernyataan yang memuat pendapat aktor untuk memperkuat *claim* dan menghubungkannya ke *ground*. Selanjutnya, sebanyak 4 teks memuat *qualifier* (Q) yang berupa persyaratan. *Qualifier* mencerminkan tindakan berupa masukan agar hubungan Islam dengan pemerintahan demokratis dapat tercapai. Kemudian, semua opini, atau sebanyak 5 teks memuat *Rebuttal* (R) yang mencerminkan tindakan, yaitu membantah umpan dari redaksi di segmen pengantar, mengkritik, dan mengemukakan kondisi yang bertentangan.

Analisis Praktik Wacana

Menurut Fairclough, praktik wacana berfokus pada bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi. Praktik wacana dalam media melibatkan pihak media dan kontributor sebagai produsen dan distributor teks, dan pihak publik sebagai konsumen teks.

Produksi dan Distribusi Teks

Teks dihasilkan melalui proses produksi yang berbeda, seperti pola kerja, bagan kerja, dan rutinitas dalam menghasilkan teks tersebut (Eriyanto, 2015). Proses produksi teks berhubungan erat dengan ideologi redaksi atau penulis teks, dan surat kabar yang menaunginya. Dalam laman *Room for Debate*, tampak bahwa media memuat teks opini dengan mengundang beberapa kontributor di luar redaksi, yang disebut editor sebagai *'knowledgeable contributors'* untuk mendiskusikan isu-isu terkini. Penyebutan *'knowledgeable contributors'* mengindikasikan bahwa *nytimes.com* ingin membangun citra bahwa penulis opini adalah ahli di bidangnya dan memiliki reputasi tersendiri. Dalam laman tersebut juga terdapat tautan *"who's who at Room for Debate"*. Redaksi secara terbuka

memberikan keterangan profil para editor, baik yang memiliki latar belakang sebagai jurnalis, editor, dan profesor atau peneliti. Dalam laman tampak pernyataan di bawah ini.

“In Room for Debate, The Times invites knowledgeable outside contributors to discuss news events and other timely issues. Reader comments are moderated Monday through Friday”. Who's Who at Room for Debate.

Media dalam penyebaran teks yang diteliti adalah media daring yang memiliki kekekalan waktu yang lebih baik dibandingkan media cetak atau televisi, sehingga memberikan dampak yang berbeda pada efek wacana itu sendiri. Prinsip jurnalisme daring juga melibatkan nilai interaktivitas atau melibatkan warganet. Redaksi membuka kesempatan pada publik untuk memberikan pertanyaan atau merekomendasikan kontributor yang kemudian dibahas dalam meja redaksi. Dengan demikian, kontributor dalam laman *Room for Debate* tersebut merupakan kontributor yang diajukan oleh pembaca dan dipilih oleh para editor *nytimes.com*. Publik diberikan akses yang luas oleh redaksi dan dibiarkan untuk menjadi pengguna (*user*). Publik juga diajak untuk berlangganan (*subscribe*) dan memilih topik yang sesuai dengan minat atau kebutuhan. Namun demikian, topik dan kontributor final yang dimunculkan pada akhirnya tetap sepenuhnya di tangan redaksi. Komentar publik juga dimoderasi oleh redaksi sesuai dengan pernyataan di atas. Dengan kata lain, dalam proses produksi dan distribusi teks, redaksi *nytimes.com* memiliki kekuasaan atau kontrol dalam menyebarkan opini atau materi perdebatan kepada para pembaca.

Konsumsi Teks

Pembaca *nytimes.com* adalah warganet (*netizens*) yang terhubung melalui jaringan komputer global. Dunia virtual yang tidak memandang sekat-sekat geografis mengindikasikan bahwa pembaca *nytimes.com* adalah warganet yang bukan hanya penduduk Amerika, tetapi juga berasal dari berbagai belahan dunia, dan ada kemungkinan berasal dari kalangan yang berbeda. Pada level ini, tampak bahwa teks dikonsumsi oleh pembaca dengan cara menanggapi pandangan penulis secara pro dan kontra. Pada segmen pengantar, dari 11 komentar publik, 7 di antaranya mendebat pernyataan dari redaksi. Mereka menyatakan bahwa seharusnya pertanyaan dari redaksi adalah apakah semua agama di dunia ini adalah penghalang bagi demokrasi. Sebagian lagi menjawab umpan dari redaksi dengan menyatakan bahwa memang Islam adalah penghalang, dan syariat Islam tidak bisa disamakan dengan demokrasi. Sementara itu, pada segmen opini, sebanyak 3 opini lebih banyak didebat oleh pembaca, 1 opini lebih banyak didukung, dan 2 opini lainnya seimbang antara yang mendebat dan yang mendukung (*ambigu*). Dengan demikian, strategi yang dilakukan oleh para penulis dalam rubrik *Room for Debate* untuk meyakinkan pembaca bahwa Islam bukan merupakan penghalang bagi demokrasi ditanggapi secara kritis dan skeptis. Semua kontributor, yang disebut *nytimes.com* sebagai *debaters* dalam laman, memiliki pandangan yang beririsan mengenai kesesuaian Islam dan demokrasi, tetapi temuan menunjukkan bahwa teks dikonsumsi secara skeptis oleh pembaca.

Analisis Praktik Sosial

Analisis praktik wacana mencakup analisis dalam **level situasional**, **level institusional**, dan **level sosial**. Akan tetapi, level institusional tidak disertakan dalam penelitian ini karena membutuhkan keterlibatan dari redaksi.

Level situasional

Analisis level situasional menunjukkan bahwa teks diproduksi dalam suatu kondisi yang khas sehingga teks tersebut berbeda dengan teks yang lain. Wacana dianggap sebagai suatu tindakan untuk merespons kondisi sosial tertentu. Dilihat dari level situasional, wacana yang terdapat dalam rubrik *Room for Debate* edisi 4 Oktober 2012 muncul karena banyaknya pemberitaan mengenai peristiwa *The Arab Spring* atau dalam bahasa Arab disebut *al-Thawrat al-'Arabiyyah*, yang berarti Revolusi Dunia Arab.

Peristiwa *The Arab Spring* merupakan gelombang revolusi yang terjadi di dunia Arab sejak 18 Desember 2010. Pemicu utama terjadinya revolusi ini berasal dari tindakan Sidi Bouzid dan Mohammed Bouzizi yang melakukan pembakaran diri sebagai bentuk protes terhadap kekuasaan diktator di Tunisia. Situasi pemerintahan yang *status quo* dan dianggap otoriter oleh masyarakat membuat protes tersebut menjalar ke Aljazair, Yordania, Mesir, Libya, Bahrain, Suriah, Yaman, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Negara-negara tersebut memiliki bentuk pemerintahan yang sama, yaitu pemerintahan otoriter, sehingga protes tersebut menyebar luas dan pada akhirnya menjadi pemberontakan sipil terhadap pemerintah. Dalam aksinya, masyarakat memanfaatkan serangan, pawai, unjuk rasa, bahkan pemanfaatan media sosial sebagai bentuk protes terhadap pelarangan internet oleh pemerintah.

Protes ini telah mengakibatkan penggulingan kekuasaan terhadap beberapa kepala negara, yaitu Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali, Presiden Mesir Hosni Mubarak, Presiden Libya Muammar Kaddafi, dan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh. Di bawah kepemimpinan yang diktator, berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan fisik, pengangguran, kemiskinan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan politik terjadi. Hal inilah yang membuat masyarakat melakukan demonstrasi dalam skala besar untuk menggulingkan pemerintahan. Fenomena *The Arab Spring* tersebut telah mengubah sistem pemerintahan beberapa wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara menjadi sistem kekuasaan rakyat (demokrasi) (Esposito et al., 2016).

Menanggapi peristiwa tersebut, Tariq Ramadhan menulis gagasannya berjudul *Waiting for the Arab Spring* di *The New York Times* versi cetak yang selanjutnya diunggah ke dalam versi *online nytimes.com*. Ramadhan menulis bahwa masyarakat Arab harus tetap menerapkan tradisi Islam agar dapat mencapai nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, keadilan, otonomi, pluralisme, serta model demokrasi dan hubungan internasional yang baru. Islam menurutnya bukan suatu penghalang untuk maju, seperti yang selama ini dikatakan oleh para orientalis. Islam menurut Ramadhan dapat menjadi lahan subur bagi kreativitas politik. Masyarakat Arab tidak boleh terlalu cepat berbahagia dengan revolusi yang tengah terjadi karena bisa saja mereka tidak menyadari bahwa apa yang menggantikan masa lalu mungkin saja menyebabkan regresi dalam hak-hak sosial dan manusia, juga bisa saja menciptakan bentuk baru dari ketergantungan terhadap dunia internasional. Itulah sebabnya, Ramadhan bersepakat bahwa masyarakat Arab perlu tetap mempertahankan identitasnya, walau pada saat yang bersamaan harus juga menghadapi tekanan asing terkait dengan proses demokrasi, kebijakan ekonomi, dan hubungan mereka dengan Israel (Ramadhan, 2012).

Topik perdebatan yang diangkat dalam rubrik *Room for Debate* menggarisbawahi pernyataan Ramadhan yang meyakini bahwa demokrasi yang diperjuangkan dalam masyarakat Arab tidak harus mengabaikan tradisi Islam yang telah menjadi identitas bagi mereka. Namun demikian, pernyataan ini dikritisi oleh redaksi *nytimes.com* untuk dikemas menjadi perdebatan yang mengundang pro dan kontra. Hubungan Islam dengan demokrasi menjadi bahasan yang luas, yang tidak hanya terbatas pada konteks dalam masyarakat Arab, tetapi juga masyarakat Islam di seluruh dunia, terutama mereka yang hidup di negara-negara mayoritas Muslim. Wacana tersebut menjadi lahan terbuka bagi publik untuk memberikan

komentar, tidak hanya bagi warga Muslim, tetapi juga warga non-Muslim, terutama publik yang hidup di Amerika Serikat.

Level sosial

Analisis level sosial melihat bagaimana aspek makro seperti sistem politik, ekonomi, dan budaya masyarakat memengaruhi pembentukan wacana dalam media. Level sosial juga berarti melihat bagaimana wacana dilahirkan karena ditentukan oleh perubahan masyarakat. Setidaknya, ada tiga faktor yang mempengaruhi munculnya wacana hubungan Islam dengan demokrasi dalam situs *nytimes.com*, yaitu adanya kebebasan pers dan sorotan media terhadap dunia Islam, sikap pemerintahan Amerika yang kontradiktif terhadap demokrasi, serta perubahan pandangan Muslim terhadap sistem pemerintahan seiring munculnya kalangan Muslim intelektual dengan semangat modernisasi politik.

Pertama, lahirnya rubrik *Room for Debates* merupakan konsekuensi dari adanya kebebasan pers di Amerika Serikat. Kebebasan Pers di Amerika Serikat (AS) dilindungi dalam *First Amendment* dalam konstitusi Amerika Serikat. Isi dari amandemen tersebut adalah tidak diperbolehkannya Pemerintah AS ikut campur dalam publikasi, penyebaran informasi, dan opini. Hanya individu, bisnis, dan organisasi yang memiliki media yang dapat mempublikasikan informasi atau opini tanpa campur tangan pemerintah. Dengan demikian, pers Amerika Serikat diberikan kebebasan dalam mengangkat isu apa pun di era keterbukaan.

Selain itu, kondisi politik yang terjadi di Amerika Serikat juga memengaruhi pembentukan wacana. Iklim yang bebas di Amerika tentu tidak terlepas dari kondisi politik AS yang liberal. Dalam *website* pemerintah Amerika Serikat secara lugas pemerintahan AS mencantumkan agenda politiknya dalam konstitusi, yaitu; (1) menyebarluaskan demokrasi sebagai alat untuk mencapai keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan bagi seluruh dunia; (2) membantu negara dengan sistem demokrasi yang baru terbentuk agar dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip demokratis; (3) membantu sistem demokrasi di seluruh dunia agar dirasakan manfaatnya di negara-negara yang bersangkutan; (4) mengidentifikasi dan menghambat rezim yang menghalangi warganya agar berhak memilih pemimpin dalam pemilihan umum yang bebas, adil, dan transparan (U.S Department of State, 2014)

Namun demikian, saat Amerika Serikat dipimpin George W. Bush, kebijakan Amerika terhadap dunia Muslim mendapat tantangan keras dari dunia internasional. Tragedi 9/11 membawa dampak sangat besar bagi hubungan AS dengan dunia Islam. Di satu sisi, dengan alasan memerangi terorisme internasional, Bush melancarkan invasi dan kemudian menduduki serta menghancurkan negara-negara Muslim lemah, yaitu Afghanistan dan Irak (Sihbudi, 2004). Kebijakan Bush tersebut dianggap telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Konsekuensi yang timbul adalah adanya protes masyarakat Amerika serta hubungan yang semakin renggang dengan dunia Muslim, khususnya Timur Tengah. Demikian pula saat pemerintahan Obama—saat wacana Islam, demokrasi, dan revolusi dunia Arab muncul—menggantikan pemerintahan Bush. Sekalipun Obama memilih cara yang lebih lunak dalam melakukan pendekatan terhadap dunia Muslim, kepercayaan masyarakat Muslim terhadap kebijakan pemerintah Amerika belum sesuai dengan harapan. Intervensi Amerika terhadap kebijakan dalam negeri di negara-negara Timur Tengah masih menjadi isu yang hangat diperbincangkan dalam media.

Faktor lain yang memengaruhi pembentukan wacana hubungan Islam dengan demokrasi dalam media adalah munculnya pandangan di kalangan Muslim mengenai sistem pemerintahan modern. Pada awal abad ke-19, Islam memasuki periode Modern yang ditandai dengan jatuhnya Mesir ke tangan Barat. Kontak dengan dunia Barat pada akhirnya

membawa konsekuensi pada timbulnya ide-ide baru, seperti rasionalisme, nasionalisme, demokrasi, dan sebagainya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang berasal dari Barat telah menimbulkan persoalan-persoalan baru, sehingga para pemimpin Islam mulai memikirkan cara bagaimana mengatasi persoalan tersebut.

Selama abad ke-19 dan 20, modernisasi diperkenalkan di berbagai belahan dunia Muslim, baik di bidang militer, birokrasi, politik, hukum, ekonomi, dan pendidikan. Lembaga-lembaga tradisional dalam negara Islam pelan-pelan dimatikan melalui proses sekularisasi bertahap, yaitu dengan memisahkan agama dari lembaga-lembaga dan fungsi-fungsi kenegaraan. Para pembaharu sekuler cenderung mendukung pemisahan agama dan politik karena bagi mereka Islam hanya terbatas pada masalah moral dan pribadi. Proses modernisasi mendorong kaum Muslimin untuk mencurahkan perhatiannya pada masalah reorganisasi politik yang efektif, termasuk di antaranya penerapan sistem demokrasi.

Namun demikian, menurut Esposito dan Voll, era 1980-an dan era 1990-an merupakan era perubahan bagi sistem pemerintahan di negara-negara Muslim. Gempuran globalisasi membuat identitas komunal menguat, sehingga banyak negara Muslim di seluruh dunia memilih jalan demokrasi (Esposito & Voll, 1996). Beberapa pemikir Muslim tampil dan mengambil jalan tengah, yaitu antara kecenderungan penolakan yang dipegang oleh banyak pemimpin agama, dan kecenderungan akomodatif terlalu besar yang ditunjukkan elite Muslim westernis-sekuler (Azra, 1996).

Berdasarkan wacana yang telah diteliti, tampak bahwa para penulis memuat aktor Islam modernis yang melakukan proses reinterpretasi atau reformulasi warisan tradisi Islam dalam konteks dunia kontemporer. Penulis juga berupaya untuk menegosiasikan nilai-nilai modern dengan nilai-nilai Islam, seperti HAM, pluralisme, kedaulatan rakyat, persamaan, kebebasan, keadilan, dan lain sebagainya. Upaya untuk menegosiasikan nilai-nilai modern ini dilakukan dengan cara memuat wacana sejarah nabi, sejarah para cendekiawan di masa lalu, dan kiprah para pemimpin di negara-negara mayoritas Muslim.

Menurut para penulis, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang ideal bagi masyarakat Muslim saat ini. Namun demikian, dalam perjalanannya, di beberapa negara Timur Tengah, bentuk pemerintahan perwakilan diterjemahkan dalam beragam konteks, sehingga pada titik tertentu sistem tersebut dimanfaatkan oleh rezim-rezim diktator dan menuai kritik. Akibatnya, pemilihan umum yang dilakukan di negara-negara Muslim dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan. Pada fase inilah Revolusi Dunia Arab pecah.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa pada dasarnya para penulis memiliki pandangan yang positif terhadap kesesuaian hubungan Islam dengan demokrasi. Strategi pewacanaan yang dilakukan oleh para penulis dalam rubrik *Room for Debate* cenderung bersifat persuasif atau memengaruhi pembaca. Pembaca secara implisit diarahkan untuk memilih satu di antara perbedaan-perbedaan tersebut, atau dengan kata lain, meyakini kebenaran pandangan penulis teks yang memandang bahwa Islam memang sesuai dengan demokrasi modern. Akan tetapi, pandangan penulis opini tidak secara menyeluruh diyakini kebenarannya oleh pembaca. Teks dikonsumsi secara pro dan kontra dan umumnya pembaca tidak setuju atau menanggapinya secara skeptis.

Lebih lanjut, wacana hubungan Islam dengan demokrasi dalam *nytimes.com* tidak dihadirkan dalam ruang yang hampa, melainkan sebagai akibat dari munculnya peristiwa Revolusi atau Kebangkitan Dunia Arab yang telah mengubah pandangan masyarakat untuk membenahi sistem pemerintahan dengan sistem kepemimpinan yang lebih demokratis. Keberpihakan penulis terhadap kalangan modernis yang terungkap dalam media Barat *nytimes.com* mencerminkan dialektika antara hubungan Islam dengan Barat. Dengan

demikian, pembentukan wacana tidak terlepas dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi, termasuk perubahan ide atau nilai-nilai dominan yang berkembang dan diterima oleh masyarakat.

Studi ini masih terbuka untuk diteliti lebih jauh, terutama dalam kaitannya dengan praktik institusi media, yaitu bagaimana kuasa, control, atau kepentingan media *nytimes.com* memengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi teks tersebut. Selain itu, keterbatasan data berupa opini mengenai hubungan Islam dengan demokrasi belum bisa menggeneralisasi pandangan-pandangan dalam masyarakat Barat mengenai sesuai atau tidaknya hubungan Islam dengan demokrasi, khususnya di kalangan intelektual. Oleh karena itu, penelitian mengenai wacana hubungan Islam dengan demokrasi dalam media-media Barat masih sangat mungkin untuk dikaji lebih dalam.

REFERENSI

- Alatas, S. F., & The Centre for Research on Islamic and Malay Affairs (RIMA). (2005). *Covering Islam : Challenges & Opportunities for Media in the Global Village*. In *Islam Zeitschrift Für Geschichte Und Kultur Des Islamischen Orients*.
- Azra, A. (1996). *Pergolakan Politik Islam*. Paramadina.
- Darajat, Z. (2019). Relasi Agama dan Negara: Perspektif Sejarah. *Buletin Al-Turas*, XXV, 75. <https://doi.org/10.15408/bat.v25i1.8682>
- Effendy, B. (2001). *Teologi Baru Politik Islam*. Galang Printika.
- Eriyanto. (2015). *Analisis Wacana Kritis: Pengantar Analisis Teks Media*. LKiS Group.
- Esposito, J. L., Sonn, T., Voll, J. O., & Öterbülbul, S. (2016). Islam and democracy after the Arab Spring. In *Uluslararası İlişkiler*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195147988.001.0001>
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (1996). Islam and Democracy: Heritage and Global Context. In *Islam and Democracy*.
- Fairclough, N. (2003). *Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research*. Routledge.
- Fairclough, N. (2013). Critical discourse analysis the critical study of language, second edition. In *Critical Discourse Analysis The Critical Study of Language, Second Edition*. <https://doi.org/10.4324/9781315834368>
- Flowerdew, J. (2012). Critical Discourse Analysis in Historiography. In *Critical Discourse Analysis in Historiography*. <https://doi.org/10.1057/9780230336841>
- Flowerdew, J., & Richardson, J. E. (2017). The routledge handbook of critical discourse studies. In *The Routledge Handbook of Critical Discourse Studies*. <https://doi.org/10.4324/9781315739342>
- Halliday, M. A. K. (2014). An Introduction to Functional Grammar. In *An Introduction to Functional Grammar*. <https://doi.org/10.4324/9780203783771>
- Hefner, R. W. (2010). The Islamic World in the Age of Western Dominance. In F. Robinsin (Ed.), *The New Cambridge History of Islam* (p. 604). Cambridge University Press.
- Nasution, H. (2014). *Pembaruan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. PT. Bulan

Bintang.

- Nida, E. A. (2015). A Componential Analysis of Meaning. In *A Componential Analysis of Meaning*. <https://doi.org/10.1515/9783110828696>
- Pierre, A. J., & Huntington, S. P. (1992). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. *Foreign Affairs*. <https://doi.org/10.2307/20045138>
- Ramadhan, T. (2012). *Waiting for an Arab Spring Ideas*. <https://www.nytimes.com/2012/10/01/opinion/waiting-for-an-arab-spring-of-ideas.html>
- Resigl, M. (2014). Argumentation Analysis and the Discourse-Historical Approach A Methodological Framework. In C. Hart (Ed.), *Contemporary Critical Discourse Studies* (1st ed., pp. 67–96). Bloomsbury Publishing Plc.
- Samaie, M., & Malmir, B. (2017). US news media portrayal of Islam and Muslims: a corpus-assisted Critical Discourse Analysis. *Educational Philosophy and Theory*. <https://doi.org/10.1080/00131857.2017.1281789>
- Sihbudi, R. (2004). Islam, Radikalisme, dan Demokrasi. In *Terorisme, Perang Global, dan Masa Depan Demokrasi*. (pp. 73–81). Matapena.
- Silverman, D. (2004). Qualitative Research: Theory, Method and Practice. In *Qualitative Research*.
- Topkev, A. (2016). Discourse analysis and media attitudes: the representation of Islam in the British press. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 37(2), 216–218. <https://doi.org/10.1080/01434632.2014.973654>
- Törnberg, A., & Törnberg, P. (2016). Muslims in social media discourse: Combining topic modeling and critical discourse analysis. *Discourse, Context and Media*. <https://doi.org/10.1016/j.dcm.2016.04.003>
- Toulmin, S. E. (2003). The uses of argument: Updated edition. In *The Uses of Argument: Updated Edition*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511840005>
- Toulmin, S. E. (2012). The Layout of Arguments. In *The Uses of Argument*. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511840005.007>
- U.S Department of State. (2014). *Democracy*. <https://www.state.gov/>
- Usher, N. (2014). Making news at the New York times. In *Making News at the New York Times*. <https://doi.org/10.5860/choice.186140>
- Voll, J. O. (2019). Islam: Continuity and change in the modern world. In *Islam: Continuity and change in the modern world*. <https://doi.org/10.4324/9780429052132>



© 2021 by Alfi Syahriyani, Untung Yowono, Afdol Tharik Wastono
This work is an open access article distributed under the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC BY SA)